



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
SUB UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIEF BUDIMAN**
2. Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)**
3. NHK : **535307**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 475.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/30 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah Seluas 1626 m2 di TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 331.500.000**

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, NISSAN SERENA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. MOTOR, HONDA PCX SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
5. MOBIL, PEUGEOT SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 72.716.000**

D. SURAT BERTAHAPAN **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 527.158.653**

F. HARTA LAINNYA **Rp. 1.000.000.000**

Sub Total **Rp. 2.406.374.653**

III. HUTANG **Rp. 18.104.901**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.388.269.752

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **29 Mei 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.